



**PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH**

JL. Raden Kusno No. 80 Mempawah Telp. (0561)691014

Web: [www.pn-mempawah.go.id](http://www.pn-mempawah.go.id)

Email : [pn\\_mempawah@yahoo.com](mailto:pn_mempawah@yahoo.com)

---

**LAPORAN MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
BULAN JANUARI 2021**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Umum**

- a. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Kinerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Pengadilan Negeri Mempawah, maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi.
- b. Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi mencakup bahasan penilaian terhadap langkah-langkah pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh setiap Unit Pelayanan yang dikedepankan untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

### **2. Dasar**

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor W17-U5/149/OT.00/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Mempawah.

### **3. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud  
Maksud melaksanakan monitoring dan evaluasi program Zona Integritas adalah untuk melakukan Penilaian mandiri terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Negeri Mempawah.
- b. Tujuan  
Agar bisa mengukur seberapa optimal program kinerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Mempawah dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

4. Ruang Lingkup
  - I. PENDAHULUAN
  - II. PELAKSANAAN
  - III. HASIL YANG DICAPAI
  - IV. ANALISA DAN EVALUASI
  - V. HAMBATAN
  - VI. PENUTUP

## **II. PELAKSANAAN**

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tempat :  
Ruang Sidang Cakra  
Waktu : Senin, 1 Februari 2021 pukul 09.00 WIB
2. Peserta  
Peserta Monitoring dan Evaluasi tidak hanya Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Mempawah sesuai SK Nomor W17- U5/305/OT.00/2/2021 tanggal 1 Februari 2021 tapi juga seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Mempawah.

## **III. HASIL YANG DICAPAI**

Hasil monitoring dan Evaluasi pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Mempawah sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan:
  - a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor SK Nomor W17- U5/305/OT.00/2/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Mempawah.
  - b. Telah ditandatangani Pakta Integritas tahun 2021 sebagai bentuk terlibatnya seluruh anggota organisasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
  - c. Pelaksanaan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Mempawah telah dilaksanakan.

## 2. Penataan Tata Laksana

- a. Standar Operasional Prosedur masing-masing Unit Kepaniteraan dan Kesekretariatan telah dibuat disesuaikan dengan kondisi standar pelayanan yang terbaru dan akan diperbaharui jika tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada.
- b. Terkait E-Office, sistem pengukuran kinerja unit telah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) MAhkamah Agung RI.
- c. Keterbukaan informasi Publik pada Unit Pelayanan Publik telah dilakukan, banner-banner pelayanan telah ditambahkan.

## 3. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Telah diperbaharui Analisis Jabatan tahun 2021
- b. Kekurangan Pegawai khususnya pada jabatan fungsional seperti Panitera Pengganti, akan dibuat Permohonan Usulan Jabatan.
- c. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai bukan merupakan control dari unit kerja Pengadilan Negeri Mempawah.
- d. Terkait Pola Mutasi Internal, mutasi pegawai antar jabatan bukan kewenangan dari unit kerja Pengadilan Negeri Mempawah.

## 4. Penguatan Akuntabilitas

- a. Pimpinan telah terlibat secara langsung pada penyusunan perencanaan, dan penyusunan perjanjian kinerja telah dilakukan serta dilakukan pemantauan pencapaian kinerja.
- b. Pimpinan juga telah terlibat secara langsung pada penyusunan Penetapan Kinerja.
- c. Telah dilakukan pemantauan pencapaian kinerja melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Monitoring Implementasi SIPP (MIS).
- d. Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) namun tidak ada IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.

## 5. Penguatan Pengawasan

- a. Pengendalian Gratifikasi telah dilakukan sosialisasi dan telah dipasang baner-banner himbauan pengendalian gratifikasi.
  - b. Pengaduan masyarakat melalui kotak pengaduan dan email pengaduan telah ada dan dibuat laporannya setiap bulan.
  - c. Wistleblowing Sistem telah disosialisasikan dan diimplementasikan.
  - d. Penanganan benturan Kepentingan telah disosialisasikan.
  - e. Tidak ada Pengaduan masyarakat yang masuk melalui kotak pengaduan dan email pengaduan.
  - f. Tidak ada laporan pengaduan yang masuk melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Telah terdapat kebijakan Standar pelayanan.
  - b. Standar Pelayanan Telah di Maklumkan
  - c. Akan Dilakukan review dan perbaikan atas Standar Prosedur Pelayanan jika tidak sesuai dengan penerapannya
  - d. Telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada bulan Januari 2021 terkait pelayanan yang telah dilakukan.
  - e. Beberapa peningkatan pelayanan publik pada bulan Januari 2019 seperti: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), antrian tunggu panggilan sidang; ruang tunggu sidang; smoking area; pelayanan untuk disabilitas.

#### **IV. ANALISA DAN EVALUASI**

Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritasi dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Mempawah belum ada laporan pungli ataupun gratifikasi yang masuk.

## **V. HAMBATAN**

Selama pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri Mempawah tidak terdapat hambatan yang berarti dan berjalan sebagaimana yang direncanakan.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Secara umum pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi pada Pengadilan Negeri Mempawah sudah berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan, namun masih perlu peningkatan terhadap inovasi pada masing-masing unit pelayanan, penambahan fasilitas pelayanan akan terus diusahakan guna mempermudah serta mendukung pembangunan Zona Integritas.

### **2. Saran**

untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik yang bebas dari korupsi, disarankan kepada unit pelayanan yang belum melengkapi sarana prasarana serta administrasi yang disesuaikan dengan pengisian lembar LKE agar segera melengkapi secepatnya.

## **VII. PENUTUP**

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dilakukan guna menuju Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Mempawah ini dibuat dengan sebenarnya, guna sebagai acuan untuk perbaikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.

Mempawah, 1 Februari 2021  
Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas  
Pengadilan Negeri Mempawah

ttd

Imelda, SH.  
NIP. 19800621 200312 2 001